



PEMERINTAHAN

Proporsi PAD Belum Setengah dari APBD

JOGIA - Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) menjadi indikator bahwa Kota Jogja masih bergantung pada transfer ke daerah (TKD) pemerintah pusat. Komisi B DPRD Kota Jogja mendorong pemerintah kota memperkuat kemandirian fiskal guna mengoptimalkan sumber PAD.

Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Mohammad Sofyan mengatakan, proporsi PAD dari total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum mencapai angka 50 persen. Kondisi itu menjadi indikasi bahwa kemandirian fiskal masih rendah. "Kami berharap PAD bisa berada di kisaran 60 atau bahkan 70 persen dari total APBD," ujar Sofyan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Jogja, Kamis (30/10).

Politisi PAN itu menyebut, rendahnya proporsi PAD juga menjadi bukti bahwa Kota Jogja masih sangat bergantung pada TKD pemerintah pusat. Padahal tahun depan transfer ke daerah berpotensi mengalami pemangkasan hingga lebih dari Rp 200 miliar.

Oleh karena itu, Sofyan mendorong agar ada segera kebijakan untuk mendukung kemandirian fiskal. Sehingga program-program pembangunan tetap bisa berjalan meskipun di tengah ancaman efisiensi nasional.

"Upaya menggenjot PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun optimalisasi aset dan barang milik daerah," bebernya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Munazar menambahkan, optimalisasi PAD bisa dilakukan dengan data wajib pajak yang valid dan tunggal. Sebab data antarorganisasi seringkali menghadapi kerancuan.

Dicontohkan, dalam sebuah rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pernah menyebut ada 600 wajib pajak hotel dan restoran di Kota Jogja. Namun di dinas pariwisata memiliki data yang lebih sedikit.

Kondisi itu, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di organisasi perangkat daerah lain. Sehingga bisa berdampak pada potensi pendapatan seperti retribusi parkir, pajak tempat hiburan, hingga reklame.

Munazar menilai, kepemilikan data yang berbeda itu tentu dapat menyulitkan potensi PAD. Sehingga penting untuk mewujudkan data tunggal. Sebab lewat data tunggal juga akan memudahkan legislatif dalam melakukan pengawasan dan membuat kebijakan.

"Potensi PAD perlu data yang valid mengenai wajib pajak" tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, dalam menghadapi pemangkasan TKD Pemkot akan menerapkan skema *money follow program* dengan menitik beratkan anggaran untuk program-program prioritas saja. (inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005